

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Profil Kabupaten Batang

Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah terletak pada 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Kota Jakarta-Surabaya. Luas daerah 78.864,16 Ha. Batas-batas wilayahnya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan. Kondisi wilayah Kabupaten Batang ini merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan.

Kabupaten ini mengalami dua kali periode pemerintahan tingkat kabupaten. Periode pertama adalah kabupaten dimasa kerajaan Mataram Islam (II) sampai penjajahan asing, dari awal abad 17 sampai dengan 31 Desember 1935. Sedang periode II, dimulai awal kebangkitan Orde Baru (8 April 1966) sampai sekarang. Sejak dihapuskan status Kabupaten (1 Januari 1936) sampai tanggal 8 April 1966, Batang digabungkan.

Dalam hal pemanfaatan tanah, lebih kurang 60% diusahakan sebagai hutan, perkebunan dan areal pertanian yang memberikan hasil komoditi berupa kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu dan hasil pertanian lainnya. Seperti dapat kita lihat dari data pada tahun 2006, dari luas lahan yang mencapai 78.864,16 Ha. lahan tanah sawah mencapai 22.411,08 Ha (28,42%) dan tanah kering seluas 56.453,16 Ha atau sebesar 71,58%. Sebagian lahan kering ini dimanfaatkan oleh perusahaan kehutanan dan perkebunan.

Tabel IV.1. Penggunaan tanah sawah di Kabupaten Batang

a.	Lahan Irigasi Teknis	7.527,74 ha
b.	Irigasi Setengah Teknis	3.297,45 ha
c.	Irigasi Sederhana	9.822,45 ha
d.	Sawah Tadah Hujan	1.763,44 ha

sumber:www.batang.go.id

Tabel IV.2. Penggunaan lahan kering di Kabupaten Batang

a.	Bangunan, Pekarangan	12.094,44 ha
b.	Tegal / Huma	19.250,75 ha
c.	Padang Rumput	89,85 ha
d.	Tambak dan Kolam	131,40 ha
e.	Hutan	13.333,47 ha
f.	Perkebunan	7.909,11 ha
g.	Lainnya	3.644,06 ha

sumber:www.batang.go.id

Dari segi kependudukan, Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2006 tercatat sejumlah 694.453 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,63% bila dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebesar 690.134 jiwa. Dari jumlah penduduk yang ada, penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Penduduk perempuan di Kabupaten Batang pada tahun 2006 sebesar 347.990 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 346.463 jiwa. Rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 99,56.

Sementara bila mengamati struktur penduduk Kabupaten Batang berdasarkan mata pencaharian, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel IV.3. Struktur Penduduk Kabupaten Batang berdasarkan Mata Pencarian 2006

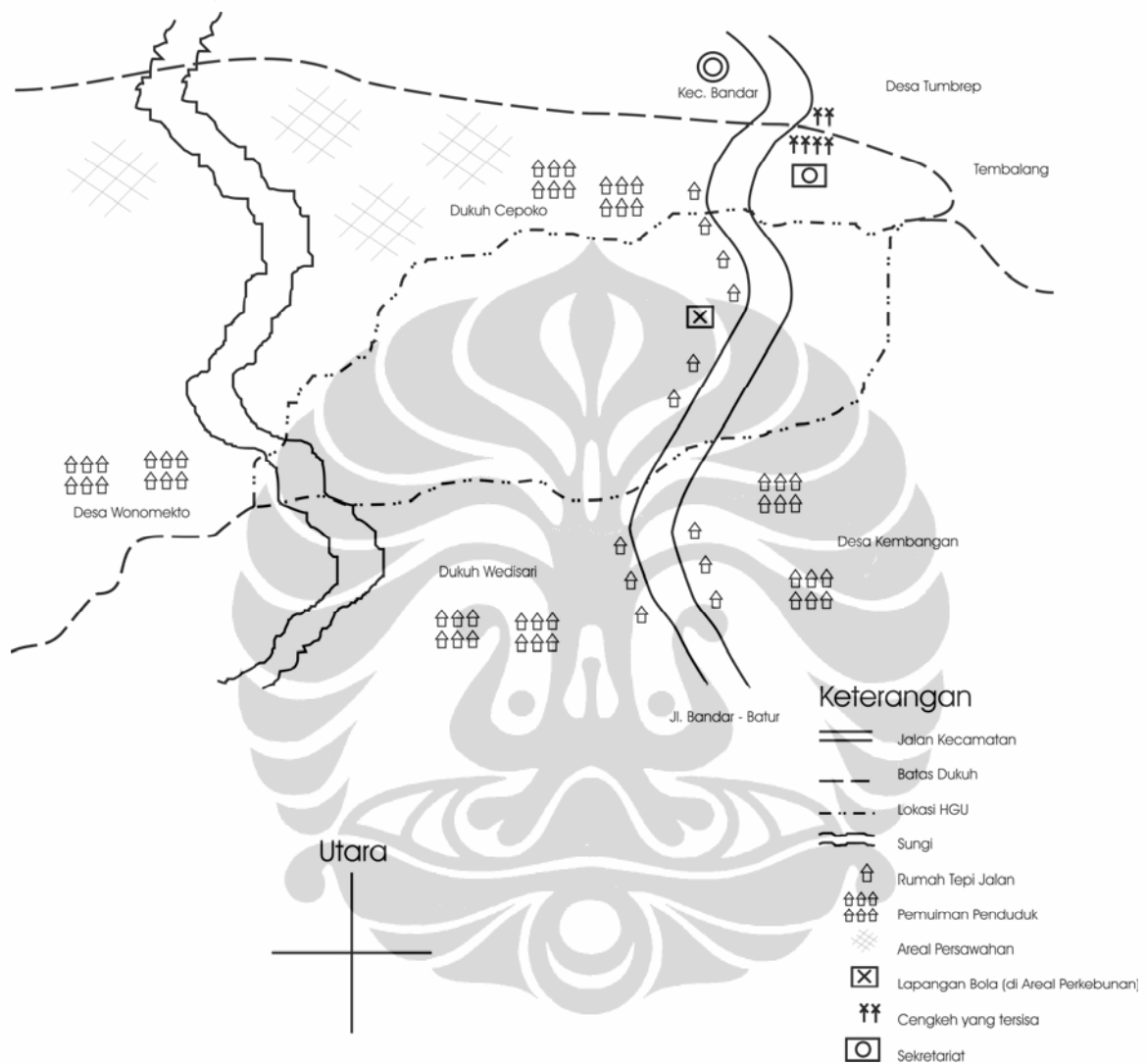
1.	Pertanian Tanaman Pangan	149.226 jiwa
2.	Perkebunan	6.865 jiwa
3.	Perikanan	7.059 jiwa
4.	Peternakan	2.729 jiwa
5.	Pertanian Lainnya	11.277 jiwa
6.	Industri Pengolahan	37.889 jiwa
7.	Perdagangan	34.349 jiwa
8.	Jasa	37.341 jiwa
9.	Angkutan	8.339 jiwa
10.	Lainnya	36.168 jiwa
	<i>Jumlah Total</i>	<i>344.180 jiwa</i>

sumber:www.batang.go.id

IV.2. Melawan Perkebunan: Upaya Paseduluran Petani Penggarap PT. Tratak (P4T) mendapatkan tanah

IV.2. 1. Wilayah Konflik

Perkebunan PT. Tratak terletak di empat pedukuhan Dukuh Cepoko Desa Tumbrep Kecamatan Bandar, Dukuh Wonomerto Desa Wonomerto Kecamatan Bandar, Dukuh Kambangan dan Dukuh Wedisari Desa Kambangan Kecamatan Blado. Pedukuhan-pedukuhan tersebut berada disekitar lokasi perkebunan Tratak yang luasnya mencapai 89.9 ha.



Gambar IV.1. Peta Sketsa Lahan Sengketa

Sumber: Diolah dari hasil transect walk-tanpa skala

Perkebunan ini terletak di wilayah Selatan Batang yang merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 400 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata wilayah ini berkisar antara 22-29°C. Lokasi perkebunan memanjang sepanjang jalan raya Dukuh Cepoko Desa Tumbrep hingga

desa Kambangan desa Bandar sehingga sangat mudah diakses. Jarak perkebunan ini dengan ibukota Kecamatan Bandar sekitar 3.5 KM kearah Selatan. Topografi tanah disekitar perkebunan Tratak adalah tanah perbukitan dengan kemiringan sedang sehingga sangat cocok untuk perkebunan. Perbukitan wilayah ini adalah sambungan dari kaki-kaki pegunungan Dieng.

IV.2.2. Sejarah Perkebunan dan Penggarapan Masyarakat

Berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi sejarah yang berdomisili di wilayah Tumbrep, terdapat beberapa tahapan tentang penguasaan tanah. Menurut penuturan informan bahwa tanah tersebut dahulu merupakan tegal pangonan (tanah untuk ladang penggembalaan ternak) dan dimiliki bersama oleh masyarakat. Selanjutnya, tanah tersebut dijadikan tanah perkebunan oleh pemerintah Belanda diawal tahun 1930, masuk menjadi pengelola perkebunan atas nama Ny. Mitha dan ditanami kopi. Namun, tidak terdapat dokumen resmi tentang perusahaan perkebunan dan struktur kepemilikan perusahaan perkebunan ini di gedung arsip pemerintah khususnya BPN. Namun, menurut Kartini, perkebunan kopi ini eksis hingga kedatangan Jepang meski juga bukan sebuah perusahaan yang sangat maju.

Kedatangan tentara Jepang pada tahun 1942 telah membuat perusahaan perkebunan ini bangkrut akibat diduduki oleh penduduk desa. Perkebunan tersebut tanamannya diganti oleh penduduk dengan tanaman jagung, ketela, dan jarak. Tanaman-tanaman ini memang diperintahkan oleh Jepang sebagai bahan kebutuhan perang. Semua hasil tanaman tersebut diberikan kepada pihak Jepang.

Kekalahan Jepang atas tentara sekutu mengakibatkan kekosongan kekuasaan di daerah jajahan mereka termasuk di Hindia Belanda. Pada tahun 1945, kekalahan Jepang dan ditariknya Tentara Jepang di Indonesia mengakibatkan tidak adanya penguasaan lahan di tanah tersebut dan mengakibatkan tanah menjadi terlantar. Dengan terlantarnya tanah tersebut masyarakat sekitar menduduki tanah yang sudah dibentuk menjadi lahan pertanian pada masa pendudukan Jepang.

Setelah Jepang pergi, perkebunan tersebut sempat masih digarap warga sampai tahun 1957. Seperti diketahui, pada tahun 1957 pemerintah Soekarno membatalkan

perjanjian KMB dan melakukan nasionalisasi perusahaan asing. Perkebunan tersebut, meski telah diterlantarkan oleh pihak Belanda dan digarap oleh masyarakat akhirnya dikuasai oleh tentara dari Pangdam Diponegoro.

Pada tahun 1957, tanah ini oleh Pangdam Diponegoro masa itu Mayjend Soeharto, diberikan pengusahaannya kepada PT. Tratak. Pada masa tersebut masyarakat masih sering dilibatkan dalam pengelolaan lahan. Luas lahan perkebunan PT. Tratak 89,84 Ha. Ihwal kepemilikan berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana tercantum dalam sertifikat HGU No.1 Tahun 1988 dan akan berakhir pada tahun 2013. Tanaman yang direkomendasikan oleh Dinas Perkebunan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tanaman keras berupa: kopi, karet dan cengkeh. Mayoritas sahamnya dimiliki oleh (alm) Yap Kiem Loan dan sekitar 5% dimiliki oleh keluarga Sumoharyomo (Bapak dari Ibu Tien Soeharto)

Perkebunan dikelola oleh Yap Kiem Loan dengan baik hingga tahun 1975. Namun ternyata juga disubkontrakkan kepada perusahaan gula Cepiring dan Sragi. Sepeninggal Yap Kiem Loan, lahan terlantar setelah dipegang pengelolaannya kepada Yap Yok Jwan alias Soetrisno yang bertindak sebagai direktur utama PT. Tratak. Dari tahun ketahun kondisi perusahaan semakin mundur. Sebab-sebab secara pasti mengapa kemunduran masih simpang siur.

Agaknya kemerosotan harga komoditas kopi dan cengkeh dimasa itu adalah sebab-sebab utama kemunduran perusahaan. Pada tahun 1988 hampir separuh lahan diterlantarkan dan warga sekitar mulai merasa dirugikan. Sebab, wilayah perkebunan itu menjadi penuh dengan tumbuhan semak belukar yang menjadi sarang bagi hama tanaman masyarakat seperti babi, tikus dan ular. Oleh karena itu, mereka melakukan pembabatan tanaman dan pembersihan di lahan perkebunan Tahun 1980, yang tersisa di lahan adalah tanaman kopi sekitar 2 Ha dan cengkeh dengan jumlah yang sama.

Sejak saat itulah, warga-warga masyarakat sekitar yang memang sebagian besar adalah petani tak bertanah (*tunakisma*) atau petani gurem berinisiatif menanam tanaman pangan di perkebunan Tratak yang terlantar. Karena kondisi perusahaan tersebut sedang kolaps, maka perusahaan melalui mandornya *Darsian*, membebaskan petani untuk menggarap dengan kewajiban sebagai berikut:

1. Pungutan wajib dikenakan bagi setiap penggarap antara seratus hingga dua ratus ribu rupiah
2. Kewajiban menyerahkan sepertiga hasil panen
3. Kerja bakti sukarela satu hari setiap tiga puluh lima hari kerja (selapan)
4. Menyerahkan tanaman pisang terbaik jika mandor membutuhkan
5. Memilih partai Golongan Karya dalam tiap Pemilu.

Tahun 1990 PT. Tratak melakkan pembongkaran gudang disusul pada tahun 1995 kantor dan pabrik dijual kepada Haryanto Prawiro untuk dijadikan sarang budidaya walet. Pada bulan Maret 1999, mandor perkebunan, *Darsian*-satu-satunya karyawan PT. Tratak yang tersisa setelah mandor lain menerima pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon, melakukan kekerasan kepada *Munir* yang merupakan penduduk Dusun Wonomerto. *Munir* disekap sehari penuh karena menolak memenuhi kewajiban menyerahkan sepertiga hasil panen. Petani penggarap berang dan merusak rumah tempat tinggal *Darsian* di lokasi perkebunan. Apalagi karena rumah *Darsian* pendiriannya dilakukan oleh petani penggarap dengan paksaan. Setelah insiden pembakaran, penggarapan terus dilakukan oleh warga tanpa memenuhi kewajiban yang disyaratkan sebelumnya.

IV.2.3. Kelahiran Paseduluran Petani Penggarap PT. Tratak (P4T)

Semenjak aksi penolakan membayar sewa, aksi pendudukan tanah dan insiden pengrusakan rumah mandor, pada bulan April 1999(tanggal 1 Muharram/Suro) , petani penggarap mendirikan organisasi dengan nama Paseduluran Petani Penggarap PT. Tratak yang dikemudian disebut P4T. Saat ini anggota penggarap perkebunan ini berjumlah 450 petani penggarap. Keseluruhan anggota P4T berasal dari empat pedukuhan disekitar perkebunan yakni Dukuh Cepoko, Dukuh Wedisari, Dukuh Kambangan, Dukuh Wonomerto.

Tabel IV.4. Jumlah dan Sebaran anggota P4T

No	Nama Dukuh	Jumlah Petani Penggarap
1	Dukuh Cepoko	95 KK
2	Dukuh Wedisari	105 KK
3	Dukuh Kambangan	137 KK
4	Dukuh Wonomerto	113 KK
	J u m l a h	450 KK

Sumber : Profil Kemiskinan P4T, telah diolah kembali

Keberanian masyarakat muncul untuk melakukan perlawanan pada saat tersebut dipicu oleh kondisi politik nasional pada masa transisi setelah kejatuhan Orde Baru. Pada masa tersebut masyarakat menyaksikan situasi yang secara ekstrim kontras dengan masa pemerintahan Orde Baru. Dibawah kendali Orde Baru, gerakan perlawanan menjadi mandul karena tindakan represif pemerintah terhadap pelaku. Masyarakat yang mengalami ketidakadilan dilanda ketakutan untuk melakukan perlawanan.

Paska pemerintahan Orde Baru yang ditumbangkan oleh gerakan massa, gerakan-gerakan sosial marak bermunculan, keran demokrasi yang terbuka sejalan dengan tuntutan reformasi tata pemerintahan menjadi agenda utama yang dituntut dan menjadi wacana yang diperbincangkan secara luas. Berbagai bentuk tindakan kolektif bermunculan secara serentak seperti demonstrasi massa, aksi protes dll.

Peristiwa tersebut disaksikan oleh masyarakat korban PT.Tratak dan menimbulkan keberanian untuk melakukan perlawanan terbuka karena iklim politik yang lebih kondusif bagi gerakan sosial. Saat yang bersamaan, bermunculan organisasi gerakan petani yang basis perjuangannya serupa untuk memperoleh hak kepemilikan tanah. Organisasi gerakan petani bermunculan tidak saja di sekitar Kabupaten Batang namun juga secara nasional marak seperti salah satu yang besar yakni Serikat Petani Pasundan (SPP) di Jawa Barat. Di sekitar Kabupaten Batang, tipe kasus yang dialami oleh gerakan petani umumnya serupa yakni petani berhadap-hadapan dengan perkebunan Swasta. Meskipun demikian beberapa tipe kasus lain juga ditemukan seperti perlawanan masyarakat lokal terhadap PTPN dan Perhutani.

Pada saat itu, tidak dimilikinya lahan pertanian adalah dorongan utama masyarakat disekitar perkebunan ini melakukan penggarapan pada lahan perkebunan PT.Tratak. Penemuan fakta bahwa para penggarap ini sebagian besar telah masuk dan menggarap lahan sejak perkebunan ini ditelantarkan pada tahun 1988. Bahkan, meskipun para penggarap kemudian diberikan kewajiban sewa oleh karyawan perkebunan para petani ini tetap mau menggarap tanah semakin membuktikan hal ini.

IV.3. Tujuan perubahan yang diharapkan

Seperti yang telah diulas, sebelum kelahiran P4T, tindakan kolektif masyarakat terbatas hanya menolak biaya sewa penggarapan mereka di atas lahan perkebunan Tratak yang dikutip oleh mandor kebun. Namun, penolakan tersebut ternyata mendorong kemarahan mandor perkebunan. Kemarahan mandor berbuah aksi balasan berupa pembakaran rumah dan pengusiran mandor perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Peristiwa pembakaran membuat masyarakat menyadari bahwa tindakan-tindakan mereka bisa bersentuhan dengan aparat hukum dengan ancaman tahanan. Sehingga mendorong kesadaran untuk segera membentuk organisasi yang didasarkan pada solidaritas sesama penggarap. Selama ini masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang posisi mereka secara hukum terhadap perkebunan. Karenanya mereka merasakan kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari luar untuk pendampingan hukum seperti lembaga bantuan hukum dan pengacara.

Tujuan-tujuan yang pada awalnya sangat sederhana ini kemudian semakin meluas seiring dengan kelahiran P4T dan meluasnya jaringan. Berkembangnya tujuan dapat ditelusuri dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) yang dirumuskan dalam Rembuq Tani III FPPB 7-9 Maret 2007. Tujuan dari FPPB selain dari penyelesaian sengketa adalah bersama-sama dengan organisasi tani yang lain di seluruh Indonesia mendorong terwujudnya Pembaruan Agraria di Indonesia. Penyelesaian sengketa adalah salah satu cara untuk

menjalankan agenda pembaruan agraria sehingga memungkinkan terwujudnya struktur agraria yang berkeadilan bagi masyarakat.

Dimasukkannya Pembaruan Agraria dalam tujuan FPPB dan P4T sebagai anggotanya dapat ditelusuri dari jaringan FPPB dengan beragam kalangan seperti Lembaga Bantuan Hukum, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Persaudaraan Warga Tani (Pewarta), mahasiswa yang telah membuka pemahaman bahwa masyarakat tani sebenarnya mempunyai hak dalam memperoleh tanah garapan yang layak, dan hak tersebut dilindungi oleh hukum.

Perubahan ini penting untuk dilihat, sebab awalnya P4T menganggap bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik perkebunan meski ditelantarkan. Kemudian, masyarakat menggarap tanah tersebut sehingga rela membayar sewa. Namun semenjak penolakan pembayaran sewa, P4T memiliki pandangan lain karena merasa berhak secara hukum memiliki tanah tersebut. Karena meskipun masa HGU PT. Tratak belum habis masa berlakunya namun sudah sekian lama tidak nampak aktivitas pengolahan lahan dan keberadaan PT. Tratak pun sudah tidak diketahui.

Dengan demikian telah terjadi pergeseran pemikiran dari isu dari harga sewa menjadi pertumbuhan klaim tentang siapa yang paling berhak dalam kepemilikan tanah perkebunan tersebut. Panduan yang mengisi arah langkah dan gerak organisasi P4T saat ini adalah pemenuhan hak sosial ekonomi melalui tanah garapan bagi warga negara.

Jelas bahwa tujuan organisasi gerakan merupakan tujuan rasional tentang struktur sosial baru, dalam hal ini struktur agraria sebagai pembentuk struktur sosial di desa. Seluruh informasi yang diperoleh dari informan dari anggota organisasi juga serupa tentang tujuan untuk melibatkan diri adalah karena keinginan untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarga petani melalui perubahan dalam struktur kepemilikan tanah melalui penyelesaian sengketa tanah. Belakangan, tujuan ini meluas menjadi agenda yang lebih besar tentang pelaksanaan pembaruan agraria.

IV.4. Dinamika Mobilisasi

Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) adalah anggota dari wadah gerakan petani terbesar di Batang yakni Forum Perjuangan Petani Kabupaten Batang (FPPB). Selain P4T, terdapat sejumlah lain organisasi petani yang bergabung didalamnya. Berikut adalah potret kasus dan organisasi Petani dalam naungan FPPB

Tabel IV.5 Potret kasus dan Organisasi Petani dibawah FPPB

No.	Kasus	Organisasi	Lokasi	Luas Lahan yang digarap (ha)	Pelaku	Pelaku Intervensi	Jumlah Anggota (KK Petani)
1	HGU PT Pagilaran, 450 ha	Paseduluran Masyarakat Gunung Kamulyaan (PMGK)	Desa Pagilaran, Kalisari, Bismo, Kecamatan Gondang, Bawang, Blado, Batang	0	PT. Pagilaran	Kepolisian, BPN, DPRD, UGM	1500
2	HGU PT Tratak, 90 ha	Paguyubban Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T)	Desa Tumbrep, kec. Bandar, kab. Batang	90	PT Tratak	Preman, BPN Batang	450
3	Tanah Perhutani, 160 ha	Persatuan Tani Tri Tunggal Sejahtera (PT3S)	Dusun Sengon, Desa Kuripan Kec. Subah kab. Batang	160	Perhutani KPH Kendal	-	300
4	Tanah Perhutani, ±50 ha	Paseduluran Petani Gringing Sari Maju P2GSM	Desa Gringgingsari Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang	50	Perhutani KPH Kendal	Perhutani	350
5	Tanah Perhutani, 150 ha		Desa Gondang, Kec. Subah, Kab. Batang	150	Perhutani KPH Kendal	-	300
6	HGU PT Simbangjati Bahagia, 152 ha		Desa Kenconorejo, Desa Simbangjati, Panjer, Wonokerso, Kec. Tulis Kab. Batang	152	PT. Simbangjati Bahagia	Preman	500
7	HGU PT Segayung, 250 ha	P2SD Paseduluran Petani Sido Dadi	Desa Wonosegoro, Desa Posong, Desa Batiombo, Desa Sembojo, Kec Tulis, kab Batang.	250	PT. Segayung	BPN, Bupati, Kepolisian	1570
8	Tanah Perhutani, 58 ha	Paseduluran Petani Sigayam Maju Sejahtera (P2SMS)	Desa Sigayam Kecamatan Wonotunggal Kab. Batang	58	Perhutani KPH Kendal	-	160
9	Polusi PT.	Paseduluran	Desa Seturi Kecamatan	0	PT.Seturi	PT. Seturi	200

	Seturi Jaya	Nelayan Seturi Jaya (PNSJ)	Batang, Batang		Jaya	Jaya, Pemda Batang	
10	Konflik Wilayah Tangkap	Paseduluran Nelayan Roban (PNR)	Dukuh Roban Desa Sengon Kecamatan Subah Batang	0	Nelayan Besar	Pemda	200
Jumlah							5390

Sumber : Profil FPPB

Bertalian dengan penjelasan tentang pola hubungan antara P4T dengan FPPB, sub bagian yang menggambarkan tipe dan proses mobilisasi disini selalu ditempatkan dalam kerangka P4T sebagai bagian dari FPPB.

Pada saat awal pembentukannya P4T disokong oleh semangat perlawanan petani penggarap yang lahir dari akumulasi kekesalan terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh pihak perkebunan yang dianggap tidak adil dengan penerapan sewa, kewajiban menyerahkan sebagian hasil panen dan kewajiban lain. Melalui P4T, penggarap berkomitmen untuk mempertahankan hak penggarapan.

Setelah pembakaran, masyarakat didera rasa takut karena ancaman hukuman terhadap pelaku. Ditengah ketakutan, masyarakat meminta pendampingan hukum oleh pengacara yang tinggal tidak jauh dari desa yakni Handoko Wibowo, SH - pengacara swasta yang ternyata memiliki jaringan yang cukup luas. Salah satunya pada saat tersebut Sekretariat Bina Desa bekerja dengan Serikat Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR). Mulailah sejumlah mahasiswa datang ke desa. SMKR berperan mendorong lahirnya organisasi tani lokal usai insiden pembakaran. Kristalisasi SMKR membetuk Persatuan Warga Tani (Pewarta). Organisasi ini berperan besar dalam memajukan gerakan tani di Kabupaten Batang melalui pendampingan, pendidikan kritis dan menggalang dukungan finansial untuk pendidikan dan kegiatan yang dilakukan organisasi petani. Dalam pendampingan hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang berperan cukup signifikan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang memfasilitasi audiensi dan dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Batang. Tidak saja memberi jalan bagi penyelesaian kasus, LBH Semarang juga menggelar pendidikan tani kritis yang semakin menguatkan semangat petani untuk melakukan advokasi melalui organisasi sebagai alat perjuangan. Beberapa bukti yang disodorkan sebagai ukuran menguatnya

semangat organisasi petani misalnya dengan pembentukan organisasi tani perempuan didalam P4T yakni Serikat Ibu Tani (SITA) yang turut dalam perjuangan untuk mewujudkan struktur agraria yang berkeadilan. Disamping itu P4T seringkali menjadi basis utama berbagai kegiatan FPPB karena ditunjang dengan solidnya dukungan dari anggota.



Gambar IV.2 Aksi Massa Ke DPRD Kab. Batang, 19 Juni 2007

Sumber : Dokumentasi FPPB

Dalam perjalanannya sejak didirikan, dukungan dari pihak eksternal semakin besar. Desa Tumbrep menjadi salah satu "universitas" tentang perjuangan petani penggarap untuk memperoleh hak atas tanah. Peran pendamping sangat penting dalam dinamika perlawanan petani terutama untuk membangkitkan kesadaran tentang hak-hak sosial ekonomi dan politik petani dan membantu menstrukturkan strategi perjuangan organisasi.

Saat yang sama, tindakan kolektif yang meruntuhkan kepemimpinan Orde Baru menarik perhatian banyak pihak termasuk akademisi untuk mengkaji tentang gerakan sosial. Apa yang dilakukan oleh P4T mengundang tidak saja para mahasiswa namun juga pengajar dari berbagai perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dengan

obyek gerakan petani di Batang. Misalnya beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan, dll melalui Komite Mahasiswa Yogya (KMY). Dari kota Semarang, Universitas Diponegoro. Dari perguruan tinggi dari Kabupaten Pekalongan seperti Universitas Pekalongan (UNIKAL).

Ditingkat nasional, gerakan petani di Batang mendapatkan simpati dan sejumlah LSM dan organisasi massa menawarkan aliansi dan kerja sama seperti Komite Solidaritas untuk Tindak Korban Kekerasan dan Penghilangan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kerja sama yang ditawarkan tidak saja dari organisasi yang mengusung agenda serupa yakni advokasi untuk pembaruan agraria namun juga telah meluas menjadi sinergi gerakan lintas sektor misalnya dengan kelompok-kelompok buruh seperti Aliansi Buruh Menggugat (ABM), kelompok Mahasiswa yakni Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dll. Disini terjadi proses "berbagi" sumber daya yang ada. Kader-kader petani misalnya mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam agenda-agenda pendidikan yang diselenggarakan, kemudian pada saat tertentu untuk advokasi isu nasional P4T melalui FPPB dilibatkan sebagai bagian dari koalisi. Seperti yang sedang bergulir yakni advokasi mengenai penolakan terhadap Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM).

Gagasan tentang pembaruan agraria yakni upaya penataan kembali struktur agraria yang timpang menjadi topik nasional yang hangat dibicarakan paska kejatuhan orde baru. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) adalah salah satu organisasi nasional yang fokus pada kerja advokasi untuk terwujudnya tujuan pembaruan agraria. P4T melalui FPPB masuk dan menjadi anggota KPA di tahun 2002. Agenda utama di tingkat nasional yang berhasil didorong lahirnya Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA PSDA). Saat ini juga KPA tengah mengkritisi rencana Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).

Beberapa kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPR Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah hingga DPR RI meskipun tidak secara langsung mengarah pada penyelesaian kasus, menimbulkan efek segan dari tokoh-tokoh seperti Kepala Desa, Camat, Kepolisian yang selama ini menampakkan ketidaksukaannya dengan

aksi-aksi yang dilakukan petani. Tanggal 18 November 2007, mantan presiden Megawati Soekarno Putri juga mengunjungi FPPB sebagai rangkaian dari *road show* nya di wilayah pantai utara. Lokasi kunjungannya disekitar lahan PT. Tratak. Sehingga, keberadaan organisasi juga semakin diperhitungkan.



Gambar IV.3 Kunjungan Megawati Soekarno Putri ke Desa Cepoko

Sumber: Dokumentasi FPPB

Sekitar akhir 2007, P4T bekerja sama dengan Departemen Kehutanan untuk pembuatan model tanaman sistem silvikultur intensif. Kerja sama dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi diatas lahan PT. Tratak sekaligus untuk tujuan konservasi tanah. Melalui kerja sama tersebut 200 KK petani memperoleh bantuan bibit, perawatan serta pemantauan atas tanaman sengon sejumlah 50.000 bibit, mahoni sejumlah 5.000 bibit, pete sejumlah 15.000 bibit dan durian sejumlah 15.000 bibit.

Deskripsi tipe sumber daya yang dimobilisasi oleh P4T seperti yang dikemukakan diatas, secara terstruktur bisa dibaca dalam tabel dibawah.

Tabel IV.6 Peta Mobilisasi P4T

No.	Sumber	Kategori	Tipe Sumber		Tipe Aset	
			<i>Direct Beneficiaries</i>	<i>Conscience Constituency</i>	<i>Tangible</i>	<i>Intangible</i>
1	ABM	Ormas				
2	Aktivis LSM	Individu				
3	Anggota DPR RI	Pemerintah				
4	Anggota P4T	Individu				
5	Demos	LSM				
6	Departemen Kehutanan	Pemerintah				
7	FPPB	Ormas				
8	Komnas Ham	Lembaga Negara				
9	Kontras	Ormas				
10	KPA	LSM				
11	LBH Semarang	LSM				
12	Mahasiswa	Perguruan Tinggi				
13	Peneliti	Perguruan Tinggi				
14	Pewarta	LSM				
15	PDIP	Partai Politik				
16	SMI	Ormas				
17	WALHI	Ormas				
18	YLBHI	LSM				

Sumber: Diolah dari temuan lapangan

Peta mobilisasi diatas menunjukkan berbagai sumber dari sumber daya. Nampak bahwa kategori sumber meliputi varian dari individu, LSM, Ormas, Partai Politik hingga pemerintah. Tipe sumber dibedakan antara *direct beneficiaries & conscience constituency*. Sedangkan tipe aset yang dikontribusikan bisa bersifat *tangible* maupun *intangible*. Tabel berikut menggambarkan berbagai wujud dari setiap tipe aset:

Tabel IV.7 Tipe dan Wujud Aset

No.	Tipe Aset	Wujud
1	Tangible	uang tenaga biaya transportasi perlengkapan sarana produksi fasilitas sekretariat
2	Intangible	loyalitas komitmen legitimasi pendidikan pengorganisasian pendampingan hukum Keterampilan Hukum sistem rujukan mediasi kasus

Sumber: Diolah dari temuan lapangan

Salah satu tantangan yang dihadapi P4T adalah tidak ditemukannya strategi yang terencana untuk mendapatkan dukungan media massa. Padahal dukungan media massa sangat diperlukan melalui pembentukan opini publik tentang kondisi yang terjadi di desa. Dengan demikian, dukungan dan keberpihakan yang lebih luas diharapkan bisa diperoleh. Selama ini, temuan penelitian menyatakan bahwa belum ada strategi khusus terkait dengan perencanaan media. Informasi yang diberitakan media sifatnya reaktif . Artinya hanya akan dipublikasikan jika dianggap memiliki

nilai berita bagi media. Bahkan dalam beberapa pemberitaan, menyudutkan organisasi dengan tokoh-tokohnya sebagai "provokator" ditengah masyarakat.

Dalam periode beberapa tahun terakhir, seiring dengan berkembangnya kesadaran yang dalam diri organisasi tentang pentingnya menggalang sumber daya pendukung, organisasi gerakan petani secara sistematis memasukkan agenda mobilisasi sumber daya sebagai salah satu agenda kerja utama. Hal ini terutama diwujudkan dengan mengembangkan inisiatif P4T untuk membangun jejaring dengan pihak-pihak lain diluar organisasi dengan maupun tanpa melalui FPPB.

Sejarah perlawanan petani di Desa Tumbrep adalah sejarah perlawanan yang ekspresif dan demonstratif. Organisasi yang kuat, didukung oleh jaringan yang luas dan dijalin melalui FPPB semakin menunjukkan karakter perlawanan petani yang demikian. Seringkali, aksi massa adalah pilihan tindakan sebagai alat penekan terhadap pemerintah daerah. Sebut saja di tahun 2006, mobilisasi massa besar-besaran dilakukan di kantor DPRD Jawa Tengah di Semarang. Jumlah massa petani saat itu diangkut dengan truk-truk besar yang jumlahnya mencapai 160 atau sekitar 9600 massa petani. Tuntutannya adalah penyelesaian seluruh kasus perkebunan di Kabupaten Batang.

Selain aksi massa, bentuk lain dari tindakan semisal lobi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil dan BPN Pusat, audiensi dengan DPRD Kabupaten dan Propinsi, Bupati untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati untuk pencabutan HGU PT. Tratak, audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah yang akhirnya membentuk Tim Penyelesaian kasus sengketa kasus Tanah.



Gambar IV.4 Aksi Massa Ke BPN Kab. Batang menuntut Pencabutan HGU Perkebunan

Sumber : Dokumentasi FPPB

Sejatinya, pihak Bupati Batang telah memberikan rekomendasi untuk pencabutan HGU PT. Tratak dengan pertimbangan bahwa secara *de facto* PT. Tratak tidak lagi beroperasi disamping bahwa masyarakat sudah menggarap lahan dengan sepengetahuan personil PT. Tratak. Namun pengaturan dan penataan kembali tanah terkendala dengan tidak dicapainya kesepakatan tentang distribusi kepemilikan tanah. Tuntutan organisasi adalah dari jumlah 89,9 ha tersebut, 81 ha didistribusikan kepada masyarakat. Disisi lain, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah menawarkan model kemitraan dengan Perkebunan swasta lain dengan masyarakat untuk menggarap lahan PT. Tratak. Sehingga tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk model kemitraan yang ditawarkan.

Awalnya status hukum tanah garapan tinggal menanti Petunjuk Teknis (Juknis) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat. Karena tak kunjung dikeluarkan, pada tanggal 14 Januari 2008, lima orang perwakilan P4T bertemu dengan Komisi II DPR RI untuk memberikan informasi tentang kasus. Pertemuan tersebut membawa harapan baru akan tuntasnya status hukum tanah. Namun ternyata generasi pemilik PT. Tratak tak tinggal diam.

Sejak akhir tahun 2007, generasi pemilik PT. Tratak melancarkan aksi yang bertujuan untuk menguasai kembali lahan perkebunan. Satu insiden yang cukup besar adalah saat puluhan orang datang ke lahan dan melakukan intimidasi kepada penggarap untuk meninggalkan lahan. Kelompok tersebut mengatas namakan Pemuda Roban Bersatu (PRB). Diketahui belakangan bahwa kelompok tersebut direkrut oleh pemilik PT. Tratak dengan bayaran sejumlah uang untuk mengusir penggarap. Sebagian anggota PRB diketahui penggarap sebagai orang yang sejak awal menunjukkan sikap anti terhadap gerakan petani. Hal ini disebabkan karena berbagai hal antara lain memudarnya pamor tokoh tersebut akibat kehadiran organisasi.

Tindakan berikut adalah menyebarkan informasi yang bersifat provokatif, tendensius yang menyudutkan penggarap dan pendamping hukumnya. Informasi disebarluaskan dengan mengangkat isu agama dan ras tertentu dan disebarkan ke masyarakat yang ditengarai potensial tersulut provokasi tersebut.

PT. Tratak juga mengajukan surat kepada Gubernur Jawa Tengah tertanggal 5 Februari 2008 yang berisi pernyataan Direktur PT. Perkebunan Tratak yang intinya menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pengelolaan kebun dan kantor kembali mulai tahun 2008, memberikan bantuan untuk pembangunan desa dan memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Surat tersebut direspon oleh dengan mengirimkan surat kepada Bupati Batang yang intinya agar mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kepada PT. Tratak untuk menata kembali lahan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Tratak menimbulkan ketegangan diantara penggarap. Hingga saat ini, konsentrasi diarahkan untuk berpikir tentang strategi yang akan dilakukan sebagai reaksi. Sembari, setiap hari secara bergiliran penggarap melakukan penjaagaan lahan dengan membangun pos-pos disekitar lahan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan tanah yang digarap dari upaya kekerasan yang dilakukan oleh "orang" PT. Tratak.

Secara teoritis, gerakan sosial dinyatakan melakukan salah satu dari tiga strategi: (1) *public education*, (2) *direct service* dan (3) *structural change*. Narasi diatas menunjukkan kecenderungan dimana strategi terutama diarahkan untuk *structural*

change. Konsentrasi strategi ini menyebabkan mobilisasi sumber daya diarahkan untuk mendapatkan dukungan untuk perubahan struktural misalnya sumber dari sumber daya yang dimobilisasi berasal dari individu atau lembaga yang bisa memberi dukungan fasilitasi dan mediasi dengan pihak yang dituju untuk penyelesaian kasus. Melalui FPPB, strategi *public education* sekaligus terangkai dengan *direct service* menjadi salah satu agenda organisasi. Berangkat dari persepsi bahwa kesadaran tentang ketidakadilan yang terjadi harus disertai dengan usaha untuk mengubah ketidakadilan. Syarat untuk bisa melakukan perubahan adalah memulainya dengan membangun kapasitas anggota dan organisasi dari sisi wawasan, pengetahuan dan keterampilan. Apalagi dengan terbukanya ruang-ruang politik yang memberi celah baru untuk upaya memperjuangkan hak ekonomi dan sosial petani.

Secara bertahap, FPPB memperluas orientasi gerakannya ke ranah politik desa. Hal ini dimulai dengan mempersiapkan kader-kader petani untuk masuk dalam bursa kepala desa. Untuk menyiapkan kader politiknya, anggota diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai paket pendidikan politik baik yang diselenggarakan secara formal maupun tidak formal. Untuk melakukan pendidikan politik ini, organisasi mendapatkan dukungan dari sejumlah organisasi lain dalam bentuk fasilitas pengajaran.

P4T dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi perjuangan kelompok petani yang modern dan mencoba menjalankan prinsip-prinsip demokrasi organisasi modern secara benar. Salah satu ukurannya adalah berlangsungnya pembagian peran yang jelas dalam organisasi. Namun, struktur ini juga berdampingan dengan peran-peran pendamping dan kuasa hukum yang menonjol dalam setiap langkah organisasi ini.

Anggota organisasi dapat memilih ketua dan pengurus organisasi secara langsung dalam sebuah Kongres yang diselenggarakan oleh organisasi setiap dua tahun sekali. Kongres terakhir yang dilakukan oleh P4T pada tahun 2004 yang menetapkan kepengurusan P4T periode 2004-2006. Seluruh pengurus merupakan petani penggarap yang berasal dari wilayah konflik.

Tabel IV.8 Struktur Organisasi P4T 2004-2006

Jabatan	Nama
Ketua Umum	Ashari
Sekretaris Umum	Warnoto
Bendahara Umum	Mulyono
Ketua perwakilan	Daari (Dk.Cepoko) Dasrun (Dk. Wedisari) Suwahno (Dk Kambangan) Daryoso (DK. Wonomerto)
Humas	Zaini untuk (Dk..Cepoko) Tahari untuk (Dk. Wedisari) Walidi untuk (Dk. Wonomerto) Nagori untuk (Dk. Kambangan)

Sumber : Ashari, data diolah kembali

Para pengurus bertanggung jawab menjalankan roda organisasi. Seluruhnya dilakukan secara sukarela tanpa menerima bayaran. Ketua Umum bertugas mengkoordinasikan anggota untuk berjalannya roda organisasi, juga memimpin pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan organisasi dan mempunyai tugas keluar untuk berurusan dengan hal-hal yang berhubungan dengan aspek hukum serta membangun jaringan solidaritas bersama petani di wilayah lain. Dalam Melaksanakan kinerjanya Ketua I dibantu oleh ketua perwakilan. Ketua perwakilan merupakan ketua dari masing-masing Dukuh yang menjadi anggota P4T. Tanggung jawab ketua perwakilan adalah membantu Ketua I dalam tugasnya mengkoordinasikan petani anggota di masing-masing Dukuh.

Para Ketua Perwakilan dibantu oleh Divisi Humas atau Hubungan Masyarakat yang memfasilitasi hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi. Tugas rutinya untuk menyebarkan undangan pertemuan, mengumpulkan iuran wajib tiap bulan dan memobilisasi anggota untuk kepentingan organisasi. Untuk pemilihan Humas, satu orang anggota yang ditunjuk dari setiap dukuh masing-masing dengan tujuan memudahkan fungsi kerja Humas karena ada pembagian wilayah. Sementara itu di dalam aktifitas surat menyurat, notulensi rapat, pendokumentasian organisasi P4T, ditugaskan seorang sekretaris organisasi.

Bendahara Umum bertugas untuk menampung iuran yang diperoleh dari masing-masing Ketua Perwakilan sebesar Rp.1.500 setiap bulan. Uang ini digunakan sebagai uang kas organisasi dengan penggunaannya hanya untuk urusan-urusan yang terkait dengan aktifitas organisasi. Juga uang ini dipakai sebagai oleh organisasi sebagai dana sosial seperti kematian dan musibah lain bagi anggota dan sanak keluarganya (keluarga inti) yang meninggal atau sakit keras dengan memberikan uang santuan sebesar Rp.150.000. Iuran bulanan tersebut masih terus rutin disetorkan oleh anggota hingga saat ini.

Meskipun memiliki struktur kepengurusan yang ditetapkan namun dalam relasi diantara bersifat tidak formal dan non-hirarkis. Para anggota berkumpul secara berkala dalam pertemuan *selapanan* (setiap 35 hari sekali). Agenda pertemuan umumnya diisi dengan memberikan informasi perkembangan umum organisasi, isu-isu yang berkaitan dengan petani dan seringkali dijadikan forum koordinasi, mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggota dan juga untuk menyusun perencanaan kegiatan. Pertemuan difasilitasi oleh para pengurus dan seringkali melibatkan pihak dari luar organisasi untuk hadir memberikan motivasi dan membagi informasi dan pengalaman tentang gerakan.

P4T adalah anggota dari organisasi petani yang lebih besar yakni Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB). Selama ini, tindakan P4T juga dipengaruhi oleh FPPB sebagai organisasi payung, terlibat dalam setiap tahapan tindakan organisasi. Pola hubungan P4T dengan FPPB tidak sebatas fungsi koordinatif namun lebih luas terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Sebagai misal, P4T berhak melakukan pemecatan terhadap anggotanya yang dinyatakan melanggar aturan organisasi. Jika anggota yang dipecat mempunyai tanah garapan di perkebunan Tratak, akibatnya anggota tersebut juga dikeluarkan dari lahan. Namun, FPPB sebagai organisasi induk akan melakukan verifikasi keseluruhan laporan baik dari anggota maupun pengurus P4T. Sehingga, keputusan P4T bisa saja dianulir.

Demikian juga dalam proses mobilisasi, lebih banyak dilakukan oleh FPPB dan bukan oleh P4T langsung. Hal ini disebabkan karena akses P4T yang sangat terbatas untuk menjangkau konstituen dari luar organisasi yang potensial. Sedangkan FPPB

yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi tani lokal memiliki tokoh-tokoh yang memungkinkannya menggalang sumber daya eksternal. Distribusi sumber daya yang diperoleh sangat ditentukan oleh FPPB. Perihal ini menjadikan isu kepemimpinan dalam P4T cukup unik karena otoritasnya berhadapan dengan pola hubungannya dengan FPPB termasuk dalam perencanaan dan mobilisasinya..

Di satu sisi, pola hubungan yang demikian dipandang positif untuk mendorong terbukanya akses P4T terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Disamping itu akan memperkuat posisi tawar P4T karena ditunjang dengan basis massa pendukung yang lebih besar melalui FPPB termasuk tokoh-tokoh yang cukup diperhitungkan didalamnya. Namun, hubungan ini disisi yang lain berpotensi melemahkan inisiatif P4T dalam melakukan proses-proses penyelesaian sengketa mereka dengan perkebunan Tratak tanpa melalui FPPB. Pada masa sekarang nampaknya hal ini belum terlihat. Namun, seiring dengan pendidikan dan pengembangan kapasitas berorganisasi yang dilakukan di P4T inisiatif-inisiatif tersebut akan hadir. Karenanya, perlu penataan pola hubungan antara P4T dengan FPPB yang lebih bersifat fleksibel.

IV.5. Struktur Agraria dan Struktur Sosial

IV.5. 1. Struktur Sosial Sebelum Kehadiran Organisasi

Lewat penuturan sejarah lisan oleh informan, sebelumnya masyarakat di keempat dukuh/desa tersebut hampir seluruhnya tidak memiliki sawah atau kebun. Tanah yang dimiliki hanya lahan terbatas tempat rumah-rumah didirikan. Kebun-kebun milik pribadi didominasi tanaman kelapa, melinjo dan cengkeh dan dikelola sendiri oleh pemiliknya. Dalam sistem pelapisan sosial yang didasarkan atas kepemilikan tanah, masyarakat di daerah sekitar lahan PT. Tratak termasuk dalam kategori tidak bertanah (tunakisma) yakni kelompok yang tidak memiliki cukup tanah yang berkualitas untuk dikelola.

Tabel IV.9 Prosentase kepemilikan tanah

No	Tipe Fungsi/Pemanfaatan	Prosentase Kepemilikan
1	Rumah tinggal	100% semua memiliki lahan untuk rumah
2	Kebun/darat	30% (70% tidak memiliki kebun)
3	Sawah	10% (90 % tidak memiliki sawah)

Sumber : diolah dari hasil observasi dan wawancara

Meskipun demikian, masyarakat masih mengandalkan hidup dari pengelolaan tanah. Sebagian masuk dalam hubungan penyakapan di sawah atau kebun didesa sekitarnya atau menyewa tanah milik orang lain dan menggarapnya. Upah buruh yang berlaku adalah paruh hasil, umumnya sepertiga untuk penyakap dan selebihnya menjadi hak pemilik tanah jika modal penanaman berasal dari pemilik tanah. Berlaku sebaliknya bila modal produksi berasal dari penyakap.

Selebihnya adalah pekerja harian lepas di saat musim tanam di sawah seperti kerja tanam (*tandur*) atau kerja membersihkan tanaman padi untuk mendapatkan upah uang atau kerja memanen padi untuk mendapatkan upah dalam bentuk bukan uang melainkan barang (*natura*). Dalam keseharian, beberapa menjalankan profesi selain sektor pertanian diluar desa seperti buruh di industri garmen di Kota Pekalongan, dan sekitarnya, bahkan hingga mengisi sektor informal di Jakarta seperti jasa ojek motor, supir, buruh bangunan dll.

Beberapa keluarga memelihara ternak ayam, hanya beberapa saja yang memelihara sapi, dan kambing dengan sistem gaduh. Gaduh, adalah sistem yang lazim diterapkan dimana seseorang menitipkan perawatan hewan ternak seperti sapi, kerbau atau kambing. Penggaduh (perawat) berhak mendapatkan setengah harga anak ternak tersebut dengan persyaratan merawat dan mencari dan memberikan makanan setiap hari. Pada saat tersebut kepadatan masyarakat juga dinyatakan masih belum sepadat sekarang. Tidak nampak kesejangan yang nyata diantara masyarakat dari status ekonominya. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat hanya setara dengan Sekolah Dasar.

Akhir tahun 1960 hingga 1980 an, merupakan masa puncak kemunculan perkebunan-perkebunan swasta di Kabupaten Batang. PT. Tratak sendiri memperoleh hak pengelolaan sejak tahun 1957. Di periode awal kemunculan perkebunan swasta, tidak ada reaksi penolakan oleh masyarakat atas kehadiran Perkebunan bahkan kehadiran perkebunan sangat didukung. Hal ini disebabkan karena fungsi sosial perkebunan terhadap masyarakat sekitar berjalan dengan diperkerjakannya sebagian besar sebagai tenaga penggarap yang mendapatkan upah yang dibayarkan secara teratur oleh perkebunan. Masyarakat bekerja tersebar ke perkebunan di Kecamatan Bandar kecamatan sekitarnya seperti pada lahan PT. Segayung di Kecamatan Tulis yang memproduksi tepung Tapioka. Di Dukuh Cepoko Kecamatan Tumbrep pada periode tersebut terdapat pabrik pengelolaan kapuk randu yang menyerap tenaga kerja hingga ratusan orang beroperasi dengan menggunakan mesin-mesin besar. Masyarakat digambarkan merasa aman karena memiliki sumber penghasilan teratur.

Mayoritas pekerja perkebunan adalah dari laki-laki. Hanya sebagian kecil perempuan yang bekerja musiman saat panen dan untuk membersihkan lahan. Hal ini disebabkan karena jenis tanaman merupakan tanaman keras yang membutuhkan tenaga cukup besar untuk pemeliharaannya.

Sekitar tahun 1980 an , gejolak pasar global menyebabkan harga kopi dan cengkeh menurun drastis. Sementara itu kapuk randu asal Indonesia tidak lagi diminati dan digantikan oleh dominasi kapuk randu yang berasal dari India dan Cina yang daya saingnya lebih baik. . Akibatnya pihak perkebunan memberhentikan banyak pekerjanya, mesin-mesin pengolah diterlantarkan dan dibiarkan berkarat tidak terurus. Demikian halnya dengan pabrik pengelolaan kapuk randu yang bahkan berhenti beroperasi karena permintaan berkurang.

Periode 1980 an juga ditandai dengan pergantian kepemilikan pada PT. Tratak yang diserahkan kepada generasi berikut dari keluarga yakni kepada Yok Johan. Pergantian kepemilikan ternyata mengubah tata pengelolaan keuangan dan tata pengelolaan produksi tanah. Pengelolaan keuangan yang dipegang generasi kedua mengarah pada inefektivitas dan inefisiensi. Dari sisi fisiologis , produktivitas tanah

semakin menurun karena tidak dilakukannya rotasi tanaman seperti seharusnya. Pengaruhnya pada kualitas hasil kopi dan cengkeh yang dihasilkan.

Krisis ekonomi nasional secara bertahap terjadi sejak akhir tahun 1980 an dan setelahnya. Di masa antara masa tersebut masyarakat yang kehilangan sumber mata pencarian mulai masuk menggarap lahan PT. Tratak. Penggarapan awalnya dilakukan oleh beberapa keluarga namun jumlahnya membesar seiring desakan kebutuhan yang terus meningkat. Kemerosotan ekonomi berdampak juga pada industri garmen di Kota Pekalongan dan sekitarnya yang sebelumnya menyerap banyak tenaga kerja, banyak yang menutup usaha. Banyak yang kemudian kembali ke desa/dukuh dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Seperti jamaknya kehidupan masyarakat desa, pola kehidupan berjalan secara tradisional. Relasi antar masyarakat terjalin secara harmonis karena kekerabatan yang erat dalam balutan kultur masyarakat Jawa. Saat masuk dan menggarap diatas lahan PT. Tratak, tidak terbersit pikiran untuk terlibat dalam proses hukum yang lebih jauh berhadapan dengan perkebunan. Masyarakat desa tidak melek hukum. Tindakan penggarapan ke lahan PT. Tratak hanya didasarkan atas naluri mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan keluarga. Bukan bersandar pada kesadaran tentang hak-hak masyarakat lokal atas sumber daya. Penggarap juga seringkali didera kekuatiran menghadapi pengusiran dari pihak perkebunan.

Dalam beberapa diskusi dengan pendamping petani menyatakan bahwa pada dasarnya sikap kritis dimiliki oleh masyarakat namun bersifat laten. Bukti terkuat yang adalah saat menemukan momentum yang tepat yakni situasi politik nasional yang kacau mendorong kelahiran gerakan perlawanan. Belakangan diketahui bahwa inisiatif masyarakat menggarap lahan banyak dipelopori oleh masyarakat yang kembali ke desa setelah usaha garmen yang mempekerjakan mereka gulung tikar saat krisis ekonomi terjadi.

Di sekitar desa/dukuh, pada saat relatif bersamaan juga bermunculan gerakan perlawanan di kecamatan Tulis terhadap PT. Ambarawa Maju yang ternyata mengelola tanah tanpa memiliki sertifikat. Juga di Kecamatan Tulis yang meliputi desa Secentong, Simbang Jati dan Wonokerto terhadap PT. Simbang Jati.

Masyarakat yang masuk dan menggarap lahan perkebunan berasal kelompok masyarakat miskin tidak bertanah. Sebagian lain, meskipun juga dilintasi, memilih untuk tidak masuk dan menggarap dengan beberapa alasan. Alasan pertama karena mereka masih memiliki sumber mata pencarian lain atau mengolah tanah milik sendiri. Kedua, karena ketakutan dengan kemungkinan konflik dengan pemilik lahan. Pada masa awal penggarapan, masyarakat nyaris tidak memiliki jaringan yang memungkinkannya mendapatkan informasi yang cukup tentang kebijakan pertanahan. Apalagi untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum atas tindakan penggarapan masyarakat Aksi-aksi kolektif sepenuhnya mengandalkan sumber daya dari dalam organisasi. Komitmen dan loyalitas yang kuat dari anggota organisasi memampukan mereka untuk mengelola gerakan meskipun sangat terbatas. Tidak ditemukan informasi tentang organisasi lokal yang formal dan terstruktur. "Organisasi" di tingkat desa terbatas hanya kumpulan orang yang bertemu secara teratur dalam forum pengajian. Inisiatif penggarapan banyak dipelopori oleh masyarakat yang kembali ke desa karena kehilangan mata pencarian di industri garmen di kota sekitar. Masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup menambah daftar penggarap. Kondisi rumah tempat tinggal masyarakat penggarap sebagian besar berstruktur tidak permanen hingga semi permanen dengan kombinasi material kayu dan batu bata. Kelompok ini masih jarang yang memiliki barang elektronik rumah tangga yang pada saat tersebut masih dianggap kemewahan.

IV.5.2. Perubahan Struktur Agraria dan Pengaruhnya pada Struktur Sosial

Selama masa penggarapan, petani dan organisasi memperoleh keuntungan finansial secara langsung dari sisa tanaman cengkeh milik PT. Tratak di pada tahun 2000 dan 2001 atau sekitar dua tahun setelah masyarakat menggarap tanpa membayar sewa. Saat musim panen cengkeh tiba dan harga cengkeh melambung tinggi menyebabkan nilai ekonomis cengkeh meningkat. Sekitar limaratus batang pohon cengkeh milik PT. Tratak yang dipanen oleh petani. Atas inisiatif Petani dan saran dari kuasa

hukumnya, hasilnya panen dibagi dua dengan PT. Tratak yang diwakilkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Bagian petani senilai lima puluh empat juta rupiah dialokasikan untuk pembiayaan operasional organisasi dan masing-masing anggota memperoleh bagian dibagi rata ke seluruh penggarap. Sementara sebagai penghargaan untuk tokoh-tokoh organisasi pada saat tersebut memperoleh nilai yang lebih besar. Kisarannya antara Rp.1.100.000 hingga Rp. 2.300.000 per orang yang dibagikan kepada enam orang.

Setelah 2001, harga cengkeh menurun drastis. Dari sekitar 7 ha Tanaman cengkeh yang tersisa juga sudah tidak memberi hasil panen yang baik. Sejak itu, hasil penjualan cengkeh yang terbatas dari sisa tanaman milik PT. Tratak langsung dikelola oleh organisasi..

Saat ini, para penggarap yang tergabung dalam P4T semuanya mempunyai tanah garapan secara individu. Kelompok penggarap yang ini berjumlah 450 orang ini mendapatkan pembagian rata-rata sekitar 0.19 ha per KK dari 85 ha tanah. Dari tanah-tanah ini, mereka menanam jagung, singkong, padi darat. Tanaman cengkeh yang tersisa seluas 4 Ha dengan jumlah tanaman 340 pohon. Lainnya sejumlah sekitar ditanami tanaman pangan. Konsep pengelolaannya tanah tersebut juga seragam yakni dikelola oleh masing-masing keluarga petani penggarap dengan tanaman pangan seperti disebutkan.



Gambar IV.5 Lahan Garapan P4T dari Hasil Distribusi Tanah PT. Tratak

Sumber Dokumentasi FPPB

Dengan adanya tanah garapan ini, para penggarap yang tergabung dalam organisasi P4T secara nyata telah merubah struktur kepemilikan tanah di empat pedukuhan di sekiitar perkebunan Tratak. Perubahan yang paling nyata adalah seluruh anggota P4T yang sebelumnya adalah petani tak bertanah (*tunakisma*) menjadi petani yang memiliki tanah pertanian sempit (*land small holders*).

Meski demikian, sempitnya lahan pertanian yang dibagi secara merata tersebut, tidak merubah secara nyata kondisi kemiskinan yang telah lama mereka alami karena luas lahan tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga petani. Hal ini terlihat dari penghitungan yang dilakukan dari hasil keseluruhan tanah garapan perkebunan Tratak.

Dari data-data perkiraan yang disajikan (Tabel IV.10), jika dihitung kembali mengacu pada angka garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah, maka para petani penggarap perkebunan Tratak ini masih tergolong miskin. Sebab, pendapatan rata sebulan ini untuk menanggung beban satu keluarga yang rata-rata berjumlah 5 orang adalah Rp.245,625. Maka, pendapatan warga penggarap perkebunan Tratak per-orang

setiap bulannya adalah Rp.49.125 (Rp.1.637/hari) jauh dibawah angka pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2007 Rp.152.847/kapita/bulan.

Meski dalam pandangan sebagian orang ini bukanlah perubahan yang signifikan, namun menurut para penggarap hal ini sangatlah membantu. Alasan utama adalah karena keluarga tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran khusus untuk membeli beras sebagai bahan konsumsi sehari-hari. Karena bisa diperoleh dari hasil panen. Selama ini, pengeluaran terbesar konsumsi adalah untuk membeli beras. Sehingga keluarga bisa memangkas pos biaya untuk beras dan bisa berhemat. Menurut mereka, dahulu sebelum tanah-tanah digarap seluruhnya oleh warga, banyak kasus pencurian tanaman di lahan ataupun di halaman rumah masyarakat. Saat ini kejadian tersebut sangat jarang terjadi.

Kalau sebelumnya tingkat pendidikan tertinggi yang bisa dijangkau hanya setara dengan Sekolah Dasar, saat ini sudah makin banyak yang melanjutkan ke sekolah menengah. Peningkatan ini tidak semata-mata karena peningkatan pendapat penggarap namun karena mulai meningkatnya kesadaran keluarga akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak.

Perubahan lainnya, para penggarap ini sepanjang tahun 1999-2007 ini telah memperbaiki rumah-rumah hunian mereka. Sepanjang tahun-tahun ini lebih dari 50 rumah diperbaiki. Meski bukan seluruhnya dari hasil garapan, namun membuktikan bahwa para penggarap ini mampu menyisihkan pendapatan dari kerja lainnya selama 1999-2007. Beberapa petani penggarap juga dapat memiliki barang-barang elektronik yang dahulu belum pernah dimiliki seperti televisi dan sepeda motor.

Tabel IV. 10 Perkiraan Pendapatan Hasil Garapan di Lahan PT. Tratak

Jenis Tanaman	Luas Lahan (Ha)	%	Total Biaya Produksi	Hasil panen/garapan/tahun	Jumlah penggarap	Pendapatan/tahun	Pendapatan/bulan
Jagung	30	35,3	300,000	3,000,000	159	2,700,000	225,000
Padi Darat	45	52,9	500,000	7,000,000	238	6,500,000	541,667
Singkong	10	11,8	10,000	2,500,000	53	2,490,000	207,500
Tanaman lain/selangan (Serai, pisang)			0	100,000	450		8,333
							245,625

Sumber : Hasil wawancara, telah diolah kembali

Disamping menggarap lahan yang ada, masyarakat juga masih melakukan pekerjaan lain seperti sebelum lahan diduduki . Jenis pekerjaan yang ditekuni sebagian besar adalah sebagai pekerja pada industri batik di Kota Pekalongan, selain bergelut di sektor informal lain seperti buruh nelayan, buruh bangunan, pengojek motor dll.

Secara sosiologis, ten Dam (Billah, Loehoer Widjanto, Aries Kristyanto 1984, hal 264 Wer-heim, 1966) mengemukakan dua prinsip yang mendasari pelapisan masyarakat yaitu *mengabdi* dan *memperabdi*. Berdasarkan kedua prinsip ini, masyarakat dibedakan kedalam dua kelompok yaitu *farm hand* dan *independent farmer*. *Farm hand* berarti masyarakat tunakisma atau tidak mempunyai cukup tanah yang berkualitas baik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Disamping itu juga tidak memperoleh dasar pendidikan yang diperlukan untuk mengelola usaha tani.Selanjutnya kelompok ini dibedakan menjadi *farm hand* dalam arti sempit dan *part time farmers*. Dalam arti sempit dirumuskan, menerima pendapatan semata-mata dari pekerjaannya sebagai buruh upahan bagi pemilik tanah ataupun petani penggarap. Sedangkan *part time farmers* mempunyai tanah garapan yang luasnya

berkisar antara 0,1 ha sampai 1 ha, tetapi umumnya hanya memiliki tanah kurang dari 0,5 ha. Petani bebas (*independent farmer*) dibedakan pula kedalam petani-bebas kecil (*small independent farmers*) dan pemilik tanah luas (*large landowners*). *Small independent farmers* dijelaskan sebagai para petani yang memiliki tanah antara 1-5 ha sedangkan *large landowner* adalah petani yang memiliki tanah lebih dari 5 ha. Perbedaan lapisan masyarakat diatas berpangkal pada hubungan *patron-client* yang berkaitan dengan hak milik atas tanah dan luas tanah yang dimiliki.

Jika sistem pelapisan masyarakat model tersebut digunakan untuk menjelaskan perubahan sosial yang terjadi dari struktur agraria sebelum dan sesudah reklamasi dan okupasi, bisa diambil kesimpulan bahwa posisi lapisan petani tidak berubah yakni masih pada lapisan yang sama. Dalam penjelasan ten Dam adalah *farm hand farmers* kategori *part time farmers*.

Sehingga, dari indikator ekonomi (dengan perhitungan perkiraan pendapatan disandingkan dengan standar hidup layak versi pemerintah) dan indikator sosial dari sistem pelapisan masyarakat, perubahan dalam struktur agraria di wilayah penelitian bertalian erat dalam kesimpulan tentang relatif tidak signifikannya perubahan yang ditimbulkan oleh struktur agraria baru yang dihasilkan.

Namun, kesimpulan ini ditolak oleh masyarakat penggarap perkebunan Tratak. Sebab, menurut masyarakat penggarap, keadaan dan hubungan sosial mereka sangat berubah setelah menggarap tanah perkebunan tersebut. Menurut mereka, mempunyai tanah garapan meskipun baru diakui legalitasnya oleh organisasi dan belum diakui legalitasnya oleh pemerintah sangat berbeda derajat sosialnya dengan tidak mempunyai tanah garapan.

Ketika kesimpulan ini dikonfrontasikan dengan Ashari (Ketua P4T):

“Meskipun tanah-tanah garapan kami sangat kecil, namun (tanah) merupakan sumber utama kami dalam mencukupi kebutuhan hidup. Meskipun hasilnya kurang, pekerjaan kami yang lain yang sifatnya tidak tetap akan bertujuan mencukupi. Ini berbeda dengan dulu, sebelum punya tanah maka pekerjaan tidak tetap kamilah yang harus mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan lainnya.”

Jawaban yang senada juga diberikan oleh Tahroni (Penggarap) dan Ropiah (Penggarap).

Nampaknya, pernyataan diatas mewakili pandangan bahwa tanah yang tidak semata-mata bernilai dari sisi ekonomi. Namun, sisi sosial religius bahwa memiliki tanah berarti memiliki harga diri dan kebanggaan bagi petani meskipun luasannya belum mencapai kecukupan secara ekonomi. Dengan mempunyai tanah, secara psikologis petani juga merasa lebih aman. Sebab, dasar hubungan sosial mereka pada aktivitas pertanian. Jika musim tanam tiba maka akan menjadi sebuah harga diri yang besar dan kebanggaan bagi petani jika mereka turut menanam seperti warga masyarakat yang lain. Dan ini akan bisa terjadi jika mereka mempunyai tanah.

Akhir tahun 2007 karena seringnya dilakukan penyadaran tentang potensi nilai tambah ekonomi dan fungsi konservasi tanah untuk mencegah erosi oleh FPPB dan Pemda Batang, petani melakukan penggantian tanaman. Tanaman yang semula berupa singkong, padi dan jagung mulai diganti dengan tanaman keras seperti sengon, mahono dan pete. Tanaman keras ditanam disela-sela tanaman pangan. Dengan bekerja sama dengan Departemen Kehutanan, Balai Pengola DAS dalam program Sivicultur Intensif, ditanam bibit tanaman keras seperti sengon, mahoni, pete, durian dan mangga sebanyak 85.000 bibit. Departemen kehutanan memberi bantuan bibit, bantuan biaya perawatan dan pemantauan tanaman. Dimasa depan diharapkan agar tanaman keras ini menjadi sumber penghasilan petani. Disamping manfaat untuk konservasi lahan yang menghindarkan tanah dari erosi.

IV.5. 3. Hubungan sosial

Sejarah perlawanan petani dimulai dengan penanaman kembali di lahan yang diterlantarkan oleh PT. Tratak. Pertama kali di tahun 1988. Pada saat tersebut, penanaman dilakukan sebagai reaksi spontan atas tidak produktifnya lahan yang ada sementara masyarakat yang tinggal di desa hidup miskin dengan lahan yang sangat terbatas. Inisiatif menanam lahan tidak terencana dan tidak serentak dan tidak

terorganisir namun dipicu oleh tindakan perorangan yang kemudian perlahan diikuti oleh yang lain.

Sebagian masyarakat petani di empat Dukuh sekitar desa di Desa Tumbrep saat itu adalah petani penggarap (sekitar 70% tidak memiliki tanah perkebunan dan 90% tidak memiliki sawah) yang mengolah tanah milik tuan tanah sekitar desa. Dalam model hubungan penyakapan (*tenancy relation*) secara umum, ada dua model yang dikenal. Yang pertama adalah hubungan penyakapan dimana penyakap memperoleh imbalan yang nilainya tetap (*fixed*) secara berkala. Model yang kedua adalah bagi hasil dihitung dari perbandingan hasil panen yang menjadi bagian penyakap. Model hubungan yang diberlakukan di wilayah penelitian adalah model kedua dimana hak penyakap diberikan sepertiga atau dikenal dengan *mertelu* dari hasil panen.

Beberapa tahun kemudian, muncul tekanan dari pihak perkebunan yang mengancam warga dengan dalih bahwa lahan tersebut akan digunakan kembali. Ternyata pernyataan tersebut tidak terbukti dan hanya sekitar empat hektar tanah yang ditanami oleh PT. Tratak. Karenanya, masyarakat kembali menanam di atas lahan.

Didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk status tanah yang ditanami dan pada saat yang sama situasi politik nasional mengalami perubahan dengan kejatuhan rezim Orde Baru membuka peluang lahirnya gerakan-gerakan alternatif untuk mendorong perubahan. Setelah melalui proses cukup panjang yang menjadi cikal bakal organisasi, di tahun 1999 petani "korban" PT. Tratak menetapkan pilihan strategi perjuangannya melalui pembentukan organisasi yakni P4T.

P4T melakukan mobilisasi sumber daya pendukung yang berasal dari dalam dan luar organisasi. Sumber daya tersebut dimanfaatkan untuk menata gerakan petani dengan merancang strategi untuk penyelesaian konflik dan pengembangan organisasi kedepan. Penyelesaian konflik bertujuan memberi kejelasan status hukum kepemilikan tanah. Sementara pengembangan organisasi diarahkan untuk membangun kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang yakni pemenuhan hak ekonomi, sosial, politik petani. Dinamika organisasi dengan mobilisasinya ternyata membawa perubahan lain disamping struktur agraria yakni menyangkut struktur sosial baru didesa.

Struktur sosial dipahami sebagai pola relasi antara elemen-elemen dasar yang ada didesa dan dalam penelitian ini elemen-elemen dasar terkait dengan keberadaan P4T dengan partisipan (anggota), tokoh dan dukungan yang diperoleh dari dalam dan luar organisasi. Informasi hasil penelitian lapangan mengungkapkan, paling tidak struktur sosial baru tersebut mencakup tiga sub utama yakni: hubungan antar anggota P4T, hubungan antar anggota dengan non-anggota, dan hubungan antara anggota dengan pemerintahan lokal.

Perubahan dari proses ketiadaan organisasi dan setelah adanya organisasi menyebabkan terbangunnya ikatan yang lebih kuat diantara anggota karena perasaan senasib sebagai pihak yang tertindas (*sub altern*). Rasa keterikatan juga lahir karena proses pembingkaihan dalam organisasi yakni pemahaman tentang telah terjadinya ketidakadilan didesa dalam hal akses masyarakat terhadap tanah dan pencitraan partisipan sebagai “korban” dari ketidakadilan.

Lahan PT.Tratak diterlantarkan selama bertahun-tahun meskipun masa HGU masih berlaku hingga 2013 dan sepatutnya secara hukum HGU bisa dibatalkan. Sementara sejumlah besar masyarakat didesa tidak bertanah dan tidak diijinkan untuk mengolah tanah terlantar. Padahal tanah merupakan faktor produksi utama masyarakat dan sejumlah fungsi lain yang dilekatkan pada tanah. Proses pembingkaihan dalam organisasi mendudukan posisi masyarakat sebagai pihak yang dizalimi hak nya dan PT. Tratak sebagai pelaku. PT. Tratak yang difasilitasi dengan kebijakan negara melalui pemberian HGU dihadap-hadapkan dengan masyarakat sebagai “musuh bersama” (*common enemy*).

Rasa keterikatan antar anggota diwujudkan dengan ekspresi-ekspresi misalnya empati saat-saat tertentu dimana seorang anggota mengalami kesulitan atau musibah, dukungan dalam bentuk materil dan non-materil digalang melalui organisasi ditengah keterbatasan yang ada. Bahkan dari iuran yang disetorkan setiap bulan oleh anggota, disiapkan pos khusus untuk membantu anggota yang tengah ditimpa musibah. Sikap-sikap yang lebih terbuka dan hangat antar anggota juga nampak dan diekspresikan melalui kunjungan silaturahmi.

Pada dasarnya, rasa keterikatan yang kuat merupakan cerminan dari karakter dasar masyarakat pedesaan di Jawa meskipun perlahan tergerus oleh arus keterbukaan dan

kompetisi hidup yang kian ketat. Namun kehadiran organisasi ibarat lonceng yang mengingatkan kembali akan kebutuhan untuk saling mendukung. Bahkan diketahui bahwa pilihan untuk mengikatkan diri secara formal sebagai anggota didorong salah satunya oleh keinginan untuk hadir sebagai bagian dari kesatuan yang diikat oleh identitas yang sama. Identitas sebagai anggota ternyata memiliki arti penting bagi masyarakat desa untuk mendapatkan legitimasi dari anggota lain.

Dari sisi ini, nampak bahwa tujuan ekonomi untuk struktur agraria yang adil bagi masyarakat desa terkait erat dengan tujuan sosial yang diharapkan oleh masyarakat desa. Ada kecenderungan bahwa tujuan organisasi tidak saja diorientasikan untuk tujuan akhir yang bersifat ekonomis; distribusi tanah, namun juga tujuan antara yakni hubungan sosial yang erat.

Faktor lain dalam hubungan antar anggota adalah hadirnya Serikat Ibu Tani (SITA)-bagian dari organisasi dibawah FPPB yang menghimpun anggota tani perempuan. Sejumlah petani perempuan dalam P4T menjadi anggota SITA. Tujuan SITA adalah membangun kesadaran dan kapasitas perempuan petani tentang hak atas tanah dan mendorong keterlibatan perempuan dalam perjuangan petani. Pembingkaiannya adalah arti penting tanah bagi perempuan dan bagaimana perempuan telah menjadi korban dari ketiadaan tanah. Selama ini peran-peran perempuan dalam gerakan petani tidak difungsikan pada posisi strategis. Karenanya, SITA dibentuk demi mendayagunakan potensi yang ada pada kelompok tani perempuan.

Diakui oleh informan bahwa kemunculan SITA yang relatif baru (tahun 2005)-yang juga digagas oleh pendamping petani, memang belum memberikan kontribusi yang berarti bagi organisasi. Kegiatannya selama ini baru terbatas pada pertemuan-pertemuan rutin yang dalam bahasa lokal disebut *kumpulan* setiap bulan sekali dengan agenda laporan perkembangan kas organisasi dan realisasi penggunaannya untuk kepentingan organisasi dan anggota. Namun dalam beberapa aksi massa, SITA terlibat dan beberapa tokohnya memegang peran kunci seperti menjadi bagian dari tim lobi saat demonstrasi ke BPN Jawa Tengah.

Dari sisi internal, anggota SITA menyatakan terdapat perubahan setelah sejumlah petani perempuan di sekitar perkebunan Tratak mengorganisir diri dengan meningkatnya kesadaran dan semangat untuk memperjuangkan hak atas tanah.

Perempuan petani lebih berani menyatakan pendapat dalam forum-forum terbuka. Dalam kultur Jawa di pedesaan yang masih lekat dengan pola-pola patriarki, cara-cara demikian merupakan perubahan dari kondisi sebelumnya dimana petani perempuan hanya merupakan "peserta pasif". Suara petani perempuan mulai dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, temuan penelitian menyatakan bahwa distribusi kesadaran dan kapasitas tingkat SITA belum merata. Dugaan penelitian bahwa hal ini tidak bisa dilepaskan dari pencitraan perempuan Jawa pada ranah domestik yang dikonstruksi secara sosial turun temurun oleh lingkungan. Disamping itu, sistem pendidikan dan pengkaderan petani perempuan juga belum tertata.



Gambar IV.6 Kumpulan/Pertemuan Serikat Ibu Tani (SITA)

Sumber: Dokumentasi FPPB

Meskipun hidup harmonis dengan masyarakat desa non-anggota, tidak berarti bahwa tidak ada ketegangan diantara mereka. Masyarakat di Jawa umumnya dilekatkan dengan sifat yang mengutamakan harmoni dan menghindari konflik terbuka. Konflik di wilayah penelitian ditemukan dalam bentuk laten yakni ketegangan dengan kelompok non-anggota yang dipandang sebagai "orang Tratak". Ada periode

dimana saat lahan Tratak yang diterlantarkan sekian lama kemudian dikelola dengan cara ditanami oleh masyarakat karena pertimbangan tidak produktifnya lahan tersebut. Saat lahan perkebunan ditanami, pihak perkebunan datang dan membatat tanaman masyarakat dengan alasan bahwa akan digunakan kembali.

Para anggota mengidentifikasi sejumlah orang yang dikategorikan sebagai "orang Tratak" dan berupaya untuk menjaga jarak. Implikasinya adalah ketegangan yang laten diantara masyarakat desa. Dalam dinamika organisasi petani, ketegangan demikian kontra produktif bagi pencapaian tujuan gerakan di desa karena dua kelompok tersebut hidup dekat berdampingan di wilayah yang sama. Perihal lain adalah kekaburan tentang batasan bagi kelompok yang diidentikkan dengan "orang Tratak", artinya bahwa pendapat tersebut bisa merupakan tuduhan yang tidak beralasan dan mengada-ada. Siapapun, dengan hasutan dan intrik dari seseorang atau sekelompok lain bisa dipersepsikan sebagai "orang Tratak".

Saat ini, tidak ada lagi lagi pekerja atau mandor PT. Tratak yang tinggal didesa. Namun insiden yang baru terjadi dimana sekitar Februari hingga Maret 2008, masyarakat menerima intimidasi dari puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Roban Bersatu (PRB). Bentuk intimidasi adalah pengusiran penggarap untuk keluar dari lahan PT. Tratak. Ada indikasi bahwa kelompok tersebut adalah orang yang dibayar oleh PT. Tratak yang berniat untuk melanjutkan penanaman kembali di lahan. Beberapa anggota dari PRB dikenal sebagai orang yang tinggal tidak jauh dari Desa Tumbreb. Sejak awal orang-orang tersebut memang menampakkan ketidaksukaannya dengan organisasi petani dan menolak untuk ikut bergabung. Dalam pertumbuhannya, ternyata organisasi dan tokoh-tokohnya semakin mendapat tempat di masyarakat sehingga memudahkan pamor tokoh-tokoh lama.

Selain pengusiran, PRB juga menyebarkan informasi bernada provokatif tentang organisasi. Sehingga ketegangan antara penggarap dengan "orang" PT. Tratak tidak bisa dihindari. Setiap saat konflik bisa pecah jika terjadi gesekan. Apalagi saat ini, penggarap membangun pos-pos penjagaan disekitar lahan yang ditunggu secara bergiliran.

Selanjutnya, perlawanan petani dengan mobilisasi sumber daya memungkinnya untuk memiliki akses terhadap otoritas lokal. Kehadiran P4T juga melahirkan sejumlah

tokoh baru didesa dari para pimpinan dan kader organisasi. P4T, seperti diketahui, mengikatkan diri ke organisasi yang lebih besar yakni Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB). FPPB memiliki sistem pengkaderan bagi anggota dengan didukung dengan sumber daya yang dimiliki oleh jaringannya seperti organisasi non-pemerintah lokal dan nasional.

Hubungan antara tokoh lokal dengan anggota organisasi memburuk diakibatkan memudarnya pengaruh dibandingkan dengan tokoh-tokoh baru kader organisasi yang kritis terhadap kebijakan desa. Lurah merasa terancam kedudukannya. Sikap permusuhan tidak ditampakkan secara terbuka, pemerintah Kelurahan cenderung memilih diam dan tidak berkomentar tentang tindak tanduk organisasi termasuk saat masyarakat menanam diatas lahan PT. Tratak. Kecuali Kepala Desa Tumbrep yang masih selalu menolak untuk hadir pada pertemuan yang diselenggarakan organisasi bahkan terus mengajak warganya untuk tidak terlibat dalam organisasi.

Sebagian besar tokoh masyarakat didesa adalah anggota P4T sehingga eksistensi organisasi menjadi kuat karena didukung oleh tokoh masyarakat. Sedangkan untuk akses terhadap pemerintah Kabupaten dijalin melalui FPPB. Tidak ada akses langsung P4T dengan pemerintah Kabupaten.

Saat ini, status hukum hak kepemilikan tanah masih atas nama PT. Tratak. Setelah rekomendasi pencabutan HGU oleh Bupati masih belum tuntas. Malah muncul halangan baru karena PT. Tratak kembali mengambil langkah-langkah untuk merebut tanah yang digarap.

IV.6. Model Mobilisasi P4T dan Pencapaian tujuan Perubahan

Mobilisasi sumber daya oleh P4T digalang dari dalam dan dari pihak luar organisasi dengan wujud yang bervariasi. Proses mobilisasi mengalami pergeseran dari sekedar bersifat insidental, tidak terencana hingga menjadi bagian dari strategi organisasi yang dipikirkan secara matang. Perubahan ini berubah seiring dengan kesadaran baru organisasi tentang pentingnya perencanaan mobilisasi. Sejak awal di desa sebenarnya sudah terdapat tumpukan sumber daya. Sumber daya ini lah yang

dimanfaatkan oleh petani untuk mengorganisir gerakannya. Misalnya dengan menggandeng pihak-pihak yang bersimpati dengan gerakan petani. Baru kemudian melebar menjadi jaringan yang lebih luas ke tingkat nasional.

Mobilisasi akhirnya menyebabkan masuknya sejumlah konstituen baru menjadi bagian dari gerakan petani. Jumlah konstituen, varian kategori dan sumber daya juga berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Konstituen yang datang juga memberi efek menggandakan jumlah konstituen dengan jaringannya masing-masing yang mengusung agenda masing-masing. Sebagian besar konstituen adalah mereka yang memang melakukan kerja pengorganisasian dan advokasi. Namun sebagian lagi membawa perspektif baru dalam perjuangan petani. Misalnya tentang isu hak asasi manusia, tindak kekerasan dll. Keragaman konstituen memberi wawasan baru yang membantu mengembangkan organisasi. Hal ini nampak secara nyata, misalnya kesadaran tentang pentingnya menempatkan petani perempuan sebagai bagian yang signifikan dalam gerakan. Yang secara formal diwujudkan dalam pembentukan sub organisasi yang menghimpun Ibu-ibu tani.

Perluasan tujuan organisasi juga bisa dikatakan merupakan dampak langsungnya. Tujuan dari sekedar mendapatkan hak atas tanah garapan yang selama ini diperjuangkan berkembang menjadi agenda yang lebih strategis yakni penataan ulang sumber-sumber agraria. Dan P4T menyatakan menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas dalam skala nasional untuk turut menyerukan tuntutan untuk reforma agraria.

Diberikannya peluang untuk mengembangkan kapasitas petani untuk memahami struktur dan mekanisme kerja pemerintahan melalui pendidikan politik mendorong semangat baru bagi petani untuk mengambil bagian dalam struktur pemerintahan desa sebagai salah satu pilihan cara yang bisa ditempuh dari dalam sistem. Cara ini jelas berbeda dengan perjuangan petani melalui P4T yang menempuh jalur diluar sistem yang mapan.

Dinamika gerakan semakin marak dengan berbagai perspektif baru yang dibawa oleh konstituen. Namun saja, pertanyaan yang hendak diajukan adalah tentang keterkaitan antara mobilisasi dengan perubahan sosial yang terjadi terutama apakah model

mobilisasi sumber daya yang selama ini dilakukan secara langsung mendorong tujuan perubahan yang diharapkan oleh P4T.

P4T hanya bisa melakukan kegiatan jika didukung dengan sumber daya. Namun yang hendak dilihat adalah terutama model mobilisasi yang menggalang pihak-pihak eksternal untuk turut menjadi bagian dari upaya perubahan struktural.

Dalam rentang tahun sejak 1999 – 2008, berbagai upaya telah dilakukan oleh P4T untuk perubahan struktural.



Tabel IV.11 Upaya Organisasi untuk mengupayakan Perubahan Struktural 1999 – 2008

Tanggal	Agenda/Kegiatan	Pihak yang ditemui
15 Nop 1999	Audensi tentang pelaporan penelantaran PT. Tratak	Ketua DPRD Kab. Batang
6 Juli 2000	Aksi massa menuntut pencabutan HGU PT. Tratak dan audiensi	Bupati Batang
25-Sep-00	Aksi massa menuntut pencabutan HGU PT. Tratak	BPN Batang
7-Apr-00	Kesimpulan BPN Pusat tentang lahan PT. Tratak yang sudah memenuhi syarat untuk didistribusikan kepada penggarap	BPN Pusat (Prof. Ir. Lutfi Nasution, MSc, Phd)
11 Mei 2001	Rapat Koordinasi Pembahasan solusi konflik antar penggarap dengan PT. Tratak difasilitasi oleh Pemda Kab. Batang	Sekda Kab. Batang
3 Juli 2001	Aksi massa menuntut percepatan pencabutan HGU PT. Tratak	BPN Kanwil Semarang
14 Mei 2001	Rapat Pembahasan kasus	Sekda Kab. Batang
18 Mei 2001	Rapat Pembahasan penyelesaian kasus	Sekda Kab. Batang
16 Okt 2001	Pemberitahuan atas rencana PT. Tratak yang akan memindahkan haknya dan permohonan pemblokiran dan tidak memperpanjang HGU serta pencabutan HGU	BPN Nasional Kab. Batang
21-Feb-02	HGU PT. Tratak dinyatakan sebagai kelas IV	Dinas Perkebunan Prop. Jawa Tengah
24-Apr-02	Aksi massa menuntut Gubernur merekomendasikan pencabutan HGU PT. Tratak	Kantor Gubernur Prop. Jawa Tengah
5-Apr-02	Rapat Koordinasi penyelesaian HGU PT. Tratak	Sekda Prop. Jawa Tengah
26-Apr-02	Pembentukan tim penyelesaian kasus tanah	Bupati Batang
26-Sep-03	Aksi damai menuntut distribusi lahan PT. Tratak kepada petani penggarap	DPRP Prop. Jawa Tengah
10-Feb-03	Permohonan Data tunggakan pajak PT. Tratak	Kepala Kantor Pajak Bumi & Bangunan Pekalongan
12 Juni 2003	Audiensi penyelesaian kasus	BPN Kab. Batang
7 Oktober	Audiensi penyelesaian kasus	Sekda Kab. Batang
4-Feb-04	Aksi massa mempertanyakan tindak lanjut kasus	BPN Kab. Batang
21-Feb-04	Pengajuan konsep penyelesaian kasus	Asisten I Sekda Kab. Batang
10-Sep-04	Rekomendasi pencabutan HGU PT. Tratak	Bupati Batang

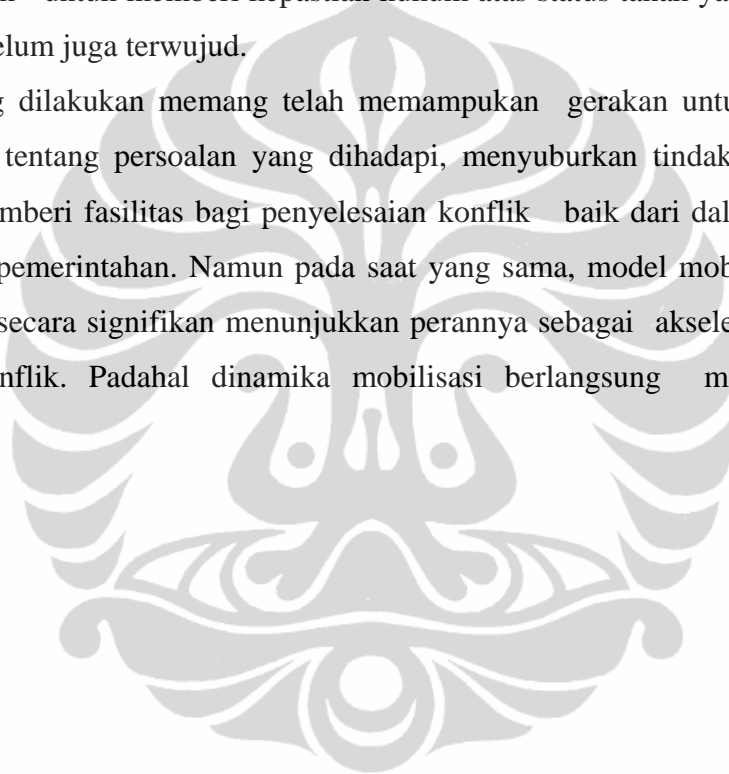
3 Oktober 2004	Permohonan pencabutan HGU PT. Tratak berdasarkan Rekomendasi Bupati	BPN Pusat
19 Nop 2004	Rapat penyelesaian kasus HGU PT. Tratak	
16 Juli 2005	Aksi massa menuntut percepatan pencabutan HGU PT. Tratak	BPN Pusat
8-Apr-05	Rapat Koordinasi dengan Sekda Kab. Batang dan BPN Batang	BPN Jawa Tengah
20 Okt 2005	Koordinasi penyelesaian kasus	Sekda dan BPN Batang
9 Des 2005	Audiensi penyelesaian kasus	Ketua Tim Kasus Tanah Prop, Jawa Tengah
24 Agust 2006	Aksi Damai menuntut Reforma Agraria dengan jalan pencabutan HGU PT. Tratak	Kepala BPN Propinsi Jawa Tengah
7-Feb-06	Koordinasi penyelesaian kasus	DPRD Jawa Tengah
23 Okt 2006	Koordinasi penyelesaian kasus	BPN Jawa Tengah
19 Juni 2007	Aksi massa atas berlarut-larutnya penyelesaian kasus	Ketua Tim Penyelesaian Kasus Tanah Prop. Jateng
25 Juli 2007	Permohonan salinan rekomendasi penilaian atas HGU PT. Tratak	DPRD Kab. Batang
30 Juli 2007	Audiensi penyelesaian kasus ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan	Kantor Pertanian & Perkebunan Kab. Batang
28 Nop 2007	Kerja sama penanaman 85.000 pohon di lahan HGU PT. Tratak dengan Dinas Kehutanan Model Silvikultur Intensif (SILIN)	Komisi A DPRD Kab. Batang
14 Januari 2008	Kerja sama penanaman 85.000 pohon di lahan HGU PT. Tratak dengan Dinas Kehutanan Model Silvikultur Intensif (SILIN)	Dinas Kehutanan
14 Januari 2008	Audiensi ke DPR RI dan DPR RI yang menyatakan bahwa lahan PT. Tratak akan dijadikan percontohan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)	DPR RI
22 Januari 2008	Audiensi penyelesaian kasus	DPRD Kab. Batang
5 Februari 2008	Demonstrasi menuntut tindak lanjut rekomendasi pencabutan HGU PT. Tratak oleh Bupati Batang	Gubernur
12 Februari 2008	Peninjauan Lapangan oleh Tim B Propinsi	Tim B Prop. & Kab. Batang

Sumber: Kronologis konflik, upaya dan tuntutan petani penggarap lahan HGU PT. Tratak.

Perjalanan panjang petani untuk mendapatkan kepastian status atas lahan yang digarap menunjukkan kerumitan masalah yang dihadapi. Meskipun Kepala Daerah Kabupaten Batang telah mengeluarkan rekomendasi pencabutan HGU PT. Tratak sejak tahun 2004 ternyata hingga saat ini belum juga terealisasi. Apalagi generasi pemilik PT. Tratak kembali berusaha mengambil alih kembali lahan yang pernah dikuasai hingga menempuh cara-cara kekerasan melalui intimidasi hingga pengusiran warga dari lahan.

Pencapaian tujuan untuk memberi kepastian hukum atas status tanah yang diduduki hingga saat ini belum juga terwujud.

Mobilisasi yang dilakukan memang telah memampukan gerakan untuk memiliki pandangan baru tentang persoalan yang dihadapi, menyuburkan tindakan-tindakan inovatif dan memberi fasilitas bagi penyelesaian konflik baik dari dalam maupun dari luar sistem pemerintahan. Namun pada saat yang sama, model mobilisasi yang ada saat belum secara signifikan menunjukkan perannya sebagai akselerator dalam penyelesaian konflik. Padahal dinamika mobilisasi berlangsung marak dalam organisasi.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
IV.1. Profil Kabupaten Batang.....	56
IV.2. Melawan Perkebunan: Upaya Paseduluran Petani Penggarap PT. Tratak (P4T) mendapatkan tanah	58
IV.2. 1. Wilayah Konflik	58
IV.2.2. Sejarah Perkebunan dan Penggarapan Masyarakat	60
IV.2.3. Kelahiran Paseduluran Petani Penggarap PT. Tratak (P4T).....	62
IV.3. Tujuan perubahan yang diharapkan.....	64
IV.4. Dinamika Mobilisasi.....	66
IV.5. Struktur Agraria dan Struktur Sosial	79
IV.5. 1. Struktur Sosial Sebelum Kehadiran Organisasi.....	79
IV.5.2. Perubahan Struktur Agraria dan Pengaruhnya pada Struktur Sosial	83
IV.5. 3. Hubungan sosial.....	89

